E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo)

Fadila Kadir[1], Hartati Tuli[2], Ayu Rakhma Wuryandini[3]
[1]Universitas Negeri Gorontalo, fadilakadir200@gmail.com
[2]Universitas Negeri Gorontalo, hartati@ung.ac.id
[3]Universitas Negeri Gorontalo, ayurakhma@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur desa di Kecamatan Anggrek, dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan Whistleblowing System tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Secara simultan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan kontribusi sebesar 43,4%. Selain itu, moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Whistleblowing System, Pencegahan Fraud, Moralitas Individu, Dana Desa.*

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Government Internal Control System (GICS) and Whistleblowing System on fraud prevention in village fund management, with individual morality as a moderating variable in village governments in Anggrek District, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province. This study employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of village officials in Anggrek District, with a sample of 76 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed through multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS software. The results indicate that the Government Internal Control System has a significant effect on fraud prevention, while the Whistleblowing System does not have a significant effect on fraud prevention. Simultaneously, the Government Internal Control System and Whistleblowing System significantly affect fraud prevention, contributing 43.4% to the variation in fraud prevention. Furthermore, individual morality is unable to moderate the influence of either the Government Internal Control System or the Whistleblowing System on fraud prevention in village fund management. These findings suggest that strengthening the internal control system is a crucial factor in preventing fraud in village fund management.

Keywords: *Government Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention, Individual Morality, Village Funds.*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

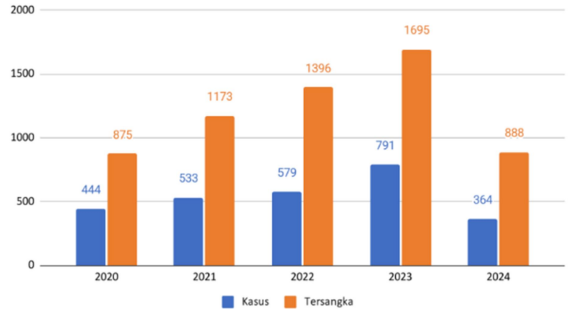
Corresponding Author:
Fadila Kadir

Universitas Negeri Gorontalo, fadilakadir200@gmail.com

PENDAHULUAN

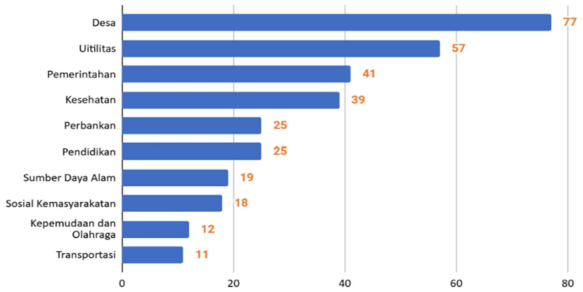
Kecurangan *(fraud)* masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, mendefinisikan *fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak baik, dilakukan melalui penipuan, misrepresentasi, atau penyembunyian fakta material. ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan (Wiranti et al., 2022).

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melakukan perbandingan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2020 hingga 2024. Hal ini untuk melihat gambaran secara umum penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan jumlah kasus korupsi yang disidik, dan jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka (Anandya & Ramadhana, 2024).



Gambar 1 Tren Korupsi Tahun 2020-2024
Sumber: *https://www.antikorupsi.org/id*

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW, 2024), tren korupsi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 444 kasus dengan 875 tersangka, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 533 kasus dengan 1.173 tersangka. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 579 kasus dan 1.396 tersangka, serta mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 791 kasus dan 1.695 tersangka. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam yaitu 364 kasus dengan 888 tersangka. Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi, jumlah kasus dan tersangka masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, khususnya dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.



E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Gambar 1 Tren 10 Sektor Teratas yang Dikorupsi Pada Tahun 2024
Sumber: https://www.antikorupsi.org/id

Sebagaimana tren pada tahun-tahun sebelumnya, sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2024. Tercatat sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di sektor desa masih menghadapi berbagai tantangan dan rawan terhadap penyimpangan.

Kasus korupsi di sektor desa juga terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di Kecamatan Anggrek. Dikutip dari *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo* (SIPP.PN-Gorontalo, 2022) terdapat kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Tolango periode 2016–2020, yang terbukti menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2019–2020 dengan kerugian negara mencapai Rp 550.972.569. Modus yang dilakukan adalah memerintahkan bendahara menyerahkan dana desa kepada Kepala Desa tersebut untuk kemudian digunakan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta dipakai untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan sehari-hari dan investasi nikel. Kasus serupa juga terjadi di Desa Langge, Kecamatan Anggrek. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pada tahun anggaran 2019-2020 mantan Kepala Desa secara sepihak mengambil alih proses pencairan dan penggunaan dana desa dengan memerintahkan bendahara untuk menyerahkan seluruh dana yang ditarik dari bank SuluGo kepadanya. Kepala desa tersebut juga terbukti menggunakan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan sejumlah kegiatan desa tidak terlaksana dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 340.039.525.

Bahkan di Desa Popalo ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa. Dikutip dari ANTERONESIA.ID dan GOTIMES, 2025 terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa yang mengalihkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 ke pos lain yang tidak sesuai peruntukannya, yakni untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dan bimbingan tekniks BUMDes di Jakarta. Pengalihan anggaran ini bertentangan dengan ketentuan penggunaan dana desa yang seharusnya diarahkan untuk membantu keluarga penerima manfaat yang terdampak secara ekonomi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip tata kelola keuangan yang baik dengan praktik dilapangan.

Pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini et al., (2025) menemukan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh budaya organisasi, *whistleblowing system*, dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, Zulfa & Rakhmawati, (2023) menemukan bahwa *whistleblowing system* dan kepekaan moral juga mempengaruhi pencegahan *fraud*. Erika et al., (2024) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan desa dan lingkungan pengendalian juga menjadi faktor yang mempengaruhi *fraud*. Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* merupakan faktor yang dapat mendukung pencegahan *fraud*. Selain itu, Putri et al., (2024) menemukan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh kompetensi aparatur. Livia et al., (2024) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. A. Z. Putri & Prasiwi, (2021) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh moralitas dan sistem pengendalian internal. Sementara itu, Buato et al., (2024) juga mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud,* yaitu pengendalian internal dan kecerdasan spiritual.

Penelitian ini memfokuskan pada dua faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan *whistleblowing system*. Pemilihan variabel sistem pengendalian intern pemerintah didasarkan pada perannya sebagai instrumen utama

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam mencegah terjadinya *fraud*. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun (2008), Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal diperlukan untuk mencegah dan menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Mahmud et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Suasri et al., (2025) menyatakan bahwa Upaya pencegahan *fraud* dapat dicapai dengan penerapan pengendalian internal yang lebih efisien dalam suatu organisasi. Salah satu komponen kunci dari pengendalian internal adalah monitoring kegiatan yang mencakup evaluasi secara berkala. Semakin baik sistem pengendalian internal maka akan mencegah tindakan kecurangan dalam organisasi. Begitupun sebaliknya, jika sistem pengendalian internalnya buruk, maka akan memicu siapapun untuk melakukan kecurangan.

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, variabel *whistleblowing system* juga sangat penting dalam mendukung pencegahan *fraud.* Mahdi & Darwis (2020) dalam Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) *whistleblowing system* merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Adanya *whistleblowing system* juga menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan tanpa adanya kekhawatiran karena kerahasiaan data terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai *fraud* (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022). Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif, pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif, sehingga meningkatkan transparansi dan mempersempit ruang bagi pelaku kecurangan. Namun, jika *whistleblowing system* tidak berfungsi, maka peluang terjadinya kecurangan akan semakin besar.

Namun, pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada moralitas individu. Moralitas individu dapat dikatakan sebagai kemampuan individu dalam memahami benar tidaknya dalam bertindak. Moralitas individu yang baik dapat menjadi pengendalian diri untuk menolak perbuatan kecurangan. Pengendalian internal efektif, didukung dengan moralitas tinggi, dapat membantu mencegah kecurangan laporan keuangan dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih terarah, terukur, dan diawasi dengan baik (Suasri et al., 2025). Wuryandini et al., (2024) menyatakan bahwa Aparatur desa yang berani melaporkan atau dalam hal ini disebut *whistleblower* akan cenderung melakukan pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa seminimal mungkin dengan cara melaporkan tindak *fraud* yang terjadi di lingkungan kerjanya dengan didasari moralitas yang tinggi, akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif, jujur, dan terbuka. Sesuai dengan teori L.Kohlberg & R.Kramer, (1969), cerminan moral aparatur desa dapat dilihat dari pikiran dan tingkah lakunya. Seorang aparatur desa yang *whitleblower* akan cenderung bertanggungjawab terhadap lingkungan kerja yang bersih dari *fraud*. Semakin tinggi moralitas individu, semakin besar kemungkinan untuk tidak terlibat dalam penggelapan dana desa (Kusumaningrum & Wulandari, 2023). Oleh karena itu, moralitas individu berperan penting dalam memperkuat atau memperlemah efektivitas sistem pengendalian intern maupun sarana (pelaporan terjadinya *fraud*) *whistleblowing system.* Berdasarkan penjelasan teori tersebut, moralitas individu dipandang memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku *whistleblower* dalam mengungkap tindakan kecurangan. Oleh karena itu, moralitas individu dianggap relevan untuk dijadikan sebagai variabel pemoderasi, sehingga peneliti tertarik menggunakan moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antarvariabel tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Suasri et al., (2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sementara *whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh dalam

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pencegahan *fraud*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wuryandini et al., (2024) mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa mendapatkan hasil tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) juga menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud, whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain itu, peran moralitas individu sebagai variabel moderasi juga menunjukkan hasil yang beragam. Dalam penelitian Suasri et al., (2025), moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud,* tetapi tidak memoderasi hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud.* Penelitian Putri et al., (2024) justru menemukan bahwa moralitas tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal maupun *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Wuryandini et al., (2024) mengindikasikan bahwa Moralitas tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) mengungkapkan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan moralitas individu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud.*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggrek. Sampel penelitian berjumlah 76 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria aparatur desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System, variabel dependen adalah pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sedangkan moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan tahapan uji kualitas data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2), serta pengujian variabel moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

	Std. Deviation		9173.97769314
Most Extreme Differences	Absolute		.086
	Positive		.086
	Negative		-.086
Test Statistic			.086
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.171
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.161
		Upper Bound	.181
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Berdasarkan table 1, diketahui bahwa pengujian normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,200 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dati tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

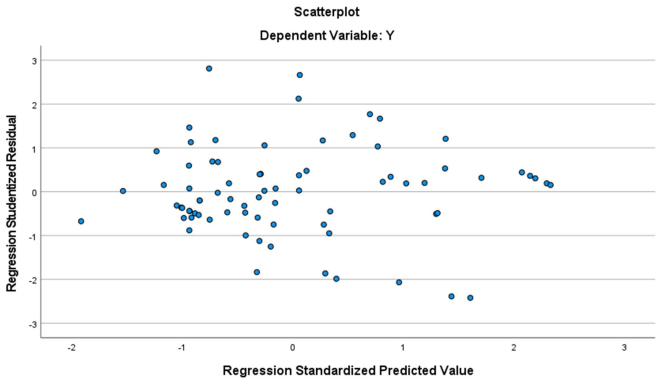
2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.572	1.749
	Whistleblowing System	.715	1.399
	Moralitas Individu	.660	1.516
a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa			

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel > 0,10 dan nilai VIP < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan gambar diatas, hasil dari pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu dan tidak ada pola yang jelas. Sehingga jika dilihat dari gambar tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5070.417	7620.863		.665	.508
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.894	.161	.564	5.549	.000
	Whistleblowing System	.422	.250	.172	1.688	.096

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ((X_1)) dan Whistleblowing System ((X_2)) memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud ((Y)). Setiap peningkatan pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatkan efektivitas pencegahan fraud sebesar 0,894 satuan, sedangkan peningkatan pada Whistleblowing System akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,422 satuan. Dengan demikian, semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System, maka semakin efektif pula upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

5. Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (t)

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5070.417	7620.863		.665	.508
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.894	.161	.564	5.549	.000
	Whistleblowing System	.422	.250	.172	1.688	.096

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,688 < t-tabel 1,993 dan nilai signifikansi 0,096 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga H2 ditolak.

b) Uji Simultan (F)

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1	Regression	6252439064.322	2	3126219532.161	29.733	.000[b]
	Residual	7675347972.876	73	105141753.053		
	Total	13927787037.197	75			

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan tabel 5, didapat nilai F-hitung sebesar 29,733 > F-tabel 2,73 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga H3 diterima.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670[a]	.449	.434	10253.865

a. Predictors: (Constant), *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

b. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,434 atau sebesar 43,4%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 43,4%, sedangkan sisanya yaitu 56,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6. Hasil Uji MRA

a) Pengujian Moderasi Pertama

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13266.549	35480.264		.374	.710
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.416	.710	.263	.586	.560
	Moralitas Individu	.655	1.422	.226	.460	.647
	SPI*MI	9.996E-6	.000	.301	.367	.714

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 7 Hasil Uji Moderasi Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 7, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,560 > 0,05. Lebih lanjut, variabel moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,647 > 0,05. Selanjutnya, nilai signifikansi untuk variabel interaksi sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas Individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,714 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

moralitas individu termasuk dalam kategori *homologiser moderasi*. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga H4 ditolak.

b) Pengujian Moderasi Kedua

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-34897.766	37594.560		-.928	.356
	Whistleblowing System	1.987	1.272	.809	1.561	.123
	Moralitas Individu	3.111	1.415	1.074	2.199	.031
	WBS*MI	-5.117E-5	.000	-.915	-1.101	.275

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 8 Hasil Uji Moderasi Kedua

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.16, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel *whistleblowing* system terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,123 > 0,05. Untuk variabel moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05. Selanjutnya variabel interaksi *whistleblowing system* dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi 0,275 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel moralitas individu dalam pengujian ini termasuk dalam ketegori *predictor moderasi*. Hal ini menunjukkan bahwa Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga H5 ditolak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP, semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud. Indikator yang memperoleh nilai tertinggi terdapat pada aspek komunikasi internal, struktur organisasi yang jelas, serta penerapan integritas dan kode etik aparatur desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya sehingga efektivitas pengendalian belum berjalan secara optimal. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga hipotesis kedua ditolak. Meskipun sistem pelaporan telah berada pada kategori baik, implementasinya belum optimal karena masih terdapat keraguan aparatur desa dalam melaporkan pelanggaran, rendahnya kepercayaan terhadap perlindungan pelapor, serta belum maksimalnya pemanfaatan saluran pelaporan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan whistleblowing system belum mampu berfungsi secara efektif sebagai sarana pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan whistleblowing system secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga hipotesis ketiga diterima. Kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 43,4% terhadap pencegahan fraud, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencegahan fraud memerlukan kombinasi antara pengendalian internal yang kuat dan sistem pelaporan pelanggaran yang memadai guna menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil uji moderasi, moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud sehingga hipotesis keempat ditolak. Moralitas individu termasuk dalam kategori homologiser moderator karena tidak memperkuat hubungan antara SPIP dan pencegahan fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern lebih dipengaruhi oleh mekanisme formal organisasi seperti pengawasan, prosedur kerja, dan pembagian tugas dibandingkan oleh tingkat moralitas individu aparatur desa.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu juga tidak mampu memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud sehingga hipotesis kelima ditolak. Moralitas individu termasuk dalam kategori predictor moderator karena hanya berpengaruh langsung terhadap pencegahan fraud, tetapi tidak memperkuat hubungan antara whistleblowing system dan pencegahan fraud. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberanian aparatur desa untuk melaporkan pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh moralitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem pelaporan, perlindungan pelapor, dan kondisi lingkungan organisasi.

KESIMPULAN

1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh siginifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. *Whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Moralitas individu tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
5. Moralitas individu tidak mampu memoderasi *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
6. Dalam Uji Koefisien Determinasi menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar 0,434 atau sebesar 43,4%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 43,4%, sedangkan sisanya yaitu 56,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch, 21.

Arang, D. F., Suyanto, & Putri, N. A. C. (2026). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi. 6(1), 50–60. https://doi.org/10.55587/jla.v6i1.212

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (n.d.). https://acfe-indonesia.or.id/anti-fraud-opinion/

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Atar Satria, Hizazi, R. K. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. 6(4), 231–242.

Blongkod, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern.

Buato, M. A., Niswatin, & Lukum, A. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Buliyohuto. 6, 1904–1915. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5827

Dr. Rochaety, E., Dr. Tresnati, R., & Prof. Dr. H Latief, A. M. (2020). Metodologi Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS. https://deepublishstore.com/shop/buku-metodologi-penelitian-skripsi-dengan-aplikasi-spss/

Empiris, S., Kabupaten, S., Asril, A. K., Taufik, T., & Silalahi, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud. 893–901.

Erika, F. S., Sari, E. N., & Sari, M. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa Dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten Asahan. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 4(6), 1674–1679. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i6.2141

Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan , Sistem Pengendalian Internal , Whistleblowing System , Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). 584–605.

Fathoni, A. H. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. 2(2).

Fatimah Ibda. (2023). Perkembangan Moral dalam Pandangan Lawrence Kohlbreg. Intelektualita, 12(1), 62–77.

Fitri, R. A., Nasir, A., & Basri, Y. M. (2025). Factors Affecting Fraud Prevention in Village Financial Management with Individual Morality As A Moderation Variable. 5(1), 86–98.

Harahap, D. S., Nasrizal, Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator. 12(1). https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065

Hasim, S. S. H., & Kunci, K. (2026). Efektivitas Pengendalian Internal , Kesesuaian Kompensasi , Moralitas Individu dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan. 9(1), 537–550.

Indriasih, D. (2020). Whistleblowing Wujudkan Tata Kelola Perusaahan Lebih Baik. In Sixteen (Ed.), Educacao e Sociedade (Vol. 1, Issue 1). CV Cendekia Press.

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar , Desa Wajak , Desa Sukolilo , Desa Blayu dan Desa. 8(1), 1–13.

Jatmiko, B., Pratiwi, N. I., Ardhi, K. F., Faculty, E., Yogyakarta, U. M., Faculty, E., & Mada, U. G. (2023). Factors Affecting Fraud in Management of Village Funds 1,2. 2020(August), 9–10.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition, 283–303. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023

Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13(2), 202–217. https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217

Kusumaningrum, R., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 156–161. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue

Laurencia, N., Nawangsari, & Susilowati, E. (2025). Moralitas Aparatur Sebagai Moderator dalam Upaya Pencegahan. Journal of Business and Economics Research, 6(3), 760–772. https://doi.org/10.47065/jbe.v6i3.8236

Livia, A. F., Indonesia, U. M., Nursalma, N., Indonesia, U. M., Sari, M. S., & Indonesia, U. M. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab . Way Kanan).

Mahmud, S. F. R., Amaliah, T. H., & Wuryandini, A. R. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur , Pengendalian Internal , dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. SEIKO : Journal of Management & Business, 8(1), 180–194.

Mentri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jdih.Kemenkeu.Go.Id, 1–56.

Novita Anggraini, Wilhelmina Mitan, & Pipiet Niken Aurelia. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(4), 257–277. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432

Nuraini, V., Fauziyah, F., & Agustin, B. H. (2025). The Influence of Organizational Culture, Whistleblowing System, and Internal Control System for Prevention Fraud. Dinasti International Journal of Education Management And Social Science, 6(5), 3949–3960. https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i5.4615

Pasetyo, D., & Arsyad, M. (2025). Pengaruh Kompetensi SDM , Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan dana Desa Abstrak Pendahuluan Metode Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan. 8(3), 1087–1098.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Spip. (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Vol. 49, pp. 69–73). (2008).

Putri, A. Z., & Prasiwi, F. D. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 18(2).

Putri, H. L., Yuliani, N. L., Mranani, M., & Anisa, F. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal), 15(1), 33–50. https://doi.org/10.18860/em.v15i1.21344

Rahadi, D. R., & Farid, M. M. (2021). Monograf Analisis Variabel Moderating. In CV. Lentera Ilmu Mandiri (Vol. 7, Issue 2). https://www.researchgate.net/publication/354521951_ANALISIS_VARIABEL_MODERATING

Rahmadani, A. P. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Whistleblowing , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. 2, 1–14.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Romadaniati, Taufik, T., & NAzir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(3), 227–237. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

Sinaga, E., Pasaribu, D., & Panjaitan, R. Y. (2025). The Influence of Village Apparatus Competence , Government Compliance in Reporting and Internal Control Systems on the Prevention of Village Fund Fraud in Villages in Pantai Cermin District. 4(3), 1521–1536.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo. (n.d.). https://sipp.pn-gorontalo.go.id/list_perkara

Solimun. (2010). Solimun – Program Studi Statistika FMIPA UB 31 V Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. 31–37. https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_ANALISIS_VARIABEL_MODERASI_DAN_MEDIASI

Suasri, E., Rininda, B. P., Amelia, N., Lestari, A., Amelia, D., & Utami, V. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. Monex: Journal of Accounting Research, 14(1), 21–35. https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.7805

Sudarmanto, E. (2023). Pencegahan Fraud dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran (M. Dr. Muhammad Hariyadi (Ed.)).

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Dr. Ir. Sutopo (Ed.); 6th ed.). Alfabeta CV.

Suwanda, D., Agustina, I., & Primastuti, A. (2023). Praktikum Pengendalian Intern Modul 1. www.cendekiapress.com

Tunggal, A. W. (2012). Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik.

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village Apparatus Competence , Individual Morality , Internal Control System and Whistleblowing System on Village Fund Fraud. 17(6), 672–684. https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65

Wiranti, S., Marhamah, & Mardawati, V. A. (2022). Analisis Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Statement. Jurnal STIE Semarang, 10(1), 1–52. https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026

Wuryandini, A. R., Panigoro, N., Bito, A., & Djunaidi, Y. R. (2024). Pengaruh Bystander Effect Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemoderasi Moralitas Dan Sistem Keuangan Desa. 8(02), 336–350.

Yolanda, O., & Putri, L. F. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa. 6(1).

Zulfa, A. A., & Rakhmawati, I. (2023). Prevention of Fraud in the Management of Village Funds : The Influence of the Competence of Village Apparatuses , Whistleblowing System , Moral Sensitivity , and Effectiveness of Internal Control in Karanganyar District. 6, 267–281.